

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan dunia internasional, berakhirnya perang dingin telah membawa corak baru bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional. Pembuat kebijakan tidak lagi meninggikan isu *high politics* seperti masalah perang atau memfokuskan kepentingannya dengan upaya *hard power*, namun telah menyetarakan isu *low politics* seperti lingkungan hidup, HAM, serta ekonomi untuk diprioritaskan dalam agenda keamanan dan perdamaian global (Kegley & Wittkopf, 1997). Berakhirnya persaingan ideologi juga membuat kesepakatan terkait strategi keamanan menjadi lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi ekonomi, lingkungan, kemanusiaan, dan politik (Wijninga & et al, 2014). Dalam hal ini, isu lingkungan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian besar dari para politisi dan cendekiawan hubungan internasional pasca perang dingin. Lingkungan muncul ke dalam agenda politik internasional pada konferensi Stockholm yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1972. Isu ini kemudian berkembang ke wilayah teritorial yang semakin besar serta ruang lingkup yang luas.

Adapun masalah lingkungan global awal diidentifikasi sebagai masalah yang mempengaruhi atmosfer, iklim, laut lepas, dan Antartika (O'Neill, 2009). Dalam hal ini, lingkungan laut menjadi penting untuk mendapat perhatian khusus dari masyarakat dunia dan sama pentingnya dengan masalah lingkungan utama lain. Hal ini karena lautan merupakan ekosistem kompleks yang berperan penting dalam pemeliharaan kehidupan di bumi. Sebesar lebih dari 25% CO² yang dihasilkan setiap tahun oleh manusia ke atmosfer diserap oleh lautan, sehingga dapat dikatakan bahwa lautan merupakan pemasok oksigen bersih terbesar di dunia dan memegang peranan yang sama pentingnya dengan hutan di daratan. Ekosistem laut juga menjadi penting dalam isu kelestarian lingkungan karena sekitar 71% dari permukaan bumi terdiri dari lautan. Terlebih lagi lautan menyimpan sumber daya yang luas dan beberapa diantaranya belum sepenuhnya ditemukan oleh manusia.

Meskipun kesejahteraan manusia terkait erat dengan laut dan sumber daya alamnya, manusia telah secara substansial mengubah permukaan laut hanya dalam beberapa abad. Isu seperti polusi, eutrofikasi, pengasaman samudra, eksplorasi

hidrokarbon laut dalam, dan pemanasan samudra global yang disertai dengan kenaikan permukaan laut sebagai akibat dari pencairan gletser yang cepat dan ekspansi termal air laut adalah contoh menonjol akibat dari tekanan yang diberikan manusia di lautan dengan dampak ekologis dan sosial ekonomi yang parah. Akibatnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut telah menjadi isu politik dan sosial yang tidak terpisahkan di banyak negara di seluruh dunia.

Dalam beberapa dekade terakhir, pencemaran lautan oleh sampah antropogenik telah diakui sebagai masalah lingkungan global yang serius. Sampah laut merupakan masalah yang kompleks dengan implikasi yang signifikan terhadap lingkungan laut dan pesisir serta aktivitas manusia di seluruh dunia. Menurut UNEP (2009), sampah laut didefinisikan sebagai “setiap bahan padat yang bertahan, diproduksi atau diproses, dibuang atau ditinggalkan di lingkungan laut dan pesisir”. Definisi ini mencakup rentang material yang sangat luas. Kendati demikian, sampah plastik mewakili sebagian besar aliran limbah kota serta sampah laut (Napper, Pahl, & Thompson, 2021). Dalam hal ini, barang-barang plastik secara konsisten merupakan salah satu jenis sampah laut yang paling melimpah dalam skala global dan biasanya diikuti oleh bahan lain dalam jumlah yang lebih kecil termasuk logam dan kaca. Puing-puing plastik juga cenderung lebih banyak ditemukan nelayan sebesar >58% dibandingkan logam, yaitu sebesar 21% (KIMO, 2008).

Sampah plastik laut global sendiri berasal dari bahan yang diperkenalkan pada abad ke-20, yaitu bahan yang ringan, murah, tahan lama, dan serbaguna yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam perawatan kesehatan, pertanian, transportasi, konstruksi, dan pengemasan (PlasticsEurope 2016). Selama satu dekade terakhir, penelitian tentang polusi plastik di laut mengungkapkan bahwa sampah plastik ada di hampir setiap habitat laut, mulai dari permukaan laut hingga sedimen laut dalam hingga wilayah tengah laut yang luas di lautan (The National Academies, 2022).

Adapun produksi produk plastik sekali pakai kini menjadi tantangan sendiri bagi dunia untuk mengatasinya (National Geographic, 2019). Di tahun 2015, produksi plastik telah meningkat secara eksponensial menjadi 448 juta ton dari yang sebelumnya 2,3 juta ton di tahun 1950. Setiap tahun, sekitar delapan juta ton sampah

plastik lolos ke lautan dari negara-negara pesisir. Selain itu, lebih dari 40% populasi global tinggal di daerah yang hanya berjarak 200 km dari lautan (Visbeck, 2018). Populasi global diperkirakan akan meningkat sekitar lebih dari 9,5 miliar pada tahun 2025, dan lebih dari 97% dari pertumbuhan ini akan terjadi di Asia dan Afrika (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2015). Dalam hal ini, masyarakat pesisir di wilayah tersebut akan memberikan beban sampah plastik yang tidak proporsional terhadap lingkungan dan khususnya lautan (Lebreton & Andrady, 2019).

Berdasarkan laporan dari Greenpeace, sumbangan sampah plastik terbesar berasal dari kemasan sekali pakai. Sebesar 161 juta sampah kemasan telah dihasilkan hanya dalam kurun waktu kurang dari enam bulan di tahun 2015 yang mana menyumbang hampir setengah dari semua sampah plastik secara global dan sebagian besar tidak pernah didaur ulang. Hal ini menjadi suatu krisis yang terus dilangsungkan melalui produk bermerek makanan, minuman, kosmetik, dan pembersih dalam kemasan satu arah. Selain itu, hal tersebut juga mendorong produksi massal, konsumsi berlebihan, dan secara signifikan berkontribusi terhadap krisis polusi plastik. Dengan masifnya produksi barang, masyarakat menjadi lebih konsumtif dan membeli barang yang berumur simpan pendek, tidak tahan lama, serta kebanyakan dijual dengan margin rendah dalam volume tinggi (Greenpeace, 2019).

Apabila plastik sekali pakai dibuang, maka akan terdegradasi dan pecah menjadi jutaan keping mikroplastik. Kepingan mikroplastik ini lah yang nantinya memungkinkan untuk berdampak pada berbagai macam biota laut, dari produsen primer hingga organisme tingkat trofik yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Hal ini juga berdampak pada kesehatan manusia, karena hewan laut yang terkontaminasi oleh mikroplastik berpotensi untuk dikonsumsi oleh manusia. Secara estetika, sampah laut juga merusak keindahan laut yang ada, dan sangat berbahaya bagi pelayaran komersial serta kapal penangkap ikan. Dengan kata lain, sampah laut merusak satwa liar, lingkungan, dan ekonomi. Dampak lain yang dihasilkan yaitu dalam bidang sosial, dimana sampah plastik laut menyebabkan berkurangnya kesempatan melakukan kegiatan wisata dan hilangnya estetika laut.

Maraknya sampah plastik di lautan erat kaitannya dengan sistem pengelolaan limbah padat di daratan. Dalam hal ini, sistem pengelolaan limbah

padat menjadi penting untuk memahami perbedaan antara limbah padat yang dikelola dan salah kelola. Apabila limbah padat dikelola dengan baik, maka seharusnya tidak berkontribusi pada limbah plastik laut karena sudah melalui pengolahan atau konversi menjadi produk lain (daur ulang, pengomposan, pembakaran). Namun dalam praktiknya, sampah plastik masih “bocor” dari sistem yang dikelola melalui tong sampah, truk, dan skenario yang dikelola lainnya. Selain itu, limbah yang tidak dimasukkan ke dalam limbah padat atau sistem pengelolaan lainnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seringkali “bocor” ke lingkungan melalui pembuangan sampah sembarangan, atau pembuangan lainnya yang tidak diatur. (The National Academies, 2022).

Adapun dalam ekosistem global, plastik terdistribusi di antara tiga fraksi: plastik yang digunakan, sampah plastik yang dikelola pascakonsumen, serta fraksi sampah plastik yang salah kelola (MPW) termasuk sampah perkotaan (Geyer et al., 2017). Jumlah limbah padat kota atau *Municipal Solid Waste* (MSW) yang dihasilkan di dunia kini telah mengalami peningkatan secara substansial selama dekade terakhir. Limbah plastik atau *Plastic Solid Waste* (PSW) mendominasi dari keseluruhan limbah padat kota, yang kebanyakan meliputi barang-barang rumah tangga seperti, busa kemasan, wadah makanan kosong, gelas sekali pakai, piring, peralatan makan, barang-barang pertanian (kantong pakan, kantong pupuk), dan lain sebagainya. Dengan demikian, limbah plastik hampir selalu berkaitan dengan limbah perkotaan, dan untuk mendaur ulang sampah plastik kota, pemisahan plastik dari sampah rumah tangga lainnya sangat penting (Ghosh & Agamuthu, 2019).

Dalam hal lingkungan ekosistem laut, Indonesia merupakan negara dengan mega-biodiversity laut tertinggi yang dikenal sebagai “*Amazon of the Ocean*” (Kemenko Maritim, 2018). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah pulau yang diperkirakan mencapai sekitar 17.504 pulau dan sebesar tiga per empat wilayahnya merupakan wilayah laut dengan panjang garis pantai lebih dari 95 ribu km (Sari, 2018). Namun, ekosistem laut Indonesia seperti terumbu karang, mangrove, dan yang lainnya menghadapi ancaman nyata akibat dari akumulasi sampah plastik yang ditemukan di sepanjang garis pantai. Indonesia sendiri masih menghadapi krisis sampah sekaligus merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di lautan. Selain itu, sekitar 3,22 juta metrik ton

(MMT) sampah plastik tidak dikelola dengan baik per tahunnya dan berkontribusi sebesar 10,1% dari sampah laut plastik secara global (Jambeck et al., 2015).

Menurut proyeksi Bank Dunia, sekitar 40% dari 142 juta penduduk perkotaan di Indonesia masih belum memiliki akses ke layanan pengumpulan sampah dasar (World Bank, 2021). Akibatnya, sampah plastik yang salah kelola (MPW) menghasilkan konsekuensi yang parah dan sangat terlihat pada kehidupan dan ekosistem laut. Hal ini dapat berdampak signifikan terhadap kondisi kehidupan dan kesehatan melalui peningkatan risiko banjir, karena sampah plastik menyumbat sistem drainase dan selokan, atau melalui polusi udara akibat pembakaran sampah. Selain itu, zat beracun dapat terbawa dan keluar dari sampah plastik, sedangkan implikasi partikel plastik yang ditemukan pada makanan laut, air, dan udara terhadap kesehatan masih belum ditelusuri lagi secara signifikan. Polusi plastik di sungai dan pantai Indonesia sendiri telah diakui oleh dunia internasional sebagai ancaman bagi pariwisata laut dan pesisir internasional (McIlgorm et al, 2009).

Banyaknya sampah yang dihasilkan oleh Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh kurang memadainya pengelolaan limbah padat dan juga kurangnya dana untuk pembangunan serta pengoperasian infrastruktur. Rata-rata pelayanan manajemen limbah padat kota di Indonesia juga belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu, tingkat generasi limbah padat tahunan di Indonesia menyentuh angka 64 juta ton dengan komposisi limbah organik biodegradable mendominasi sebesar 60%, disusul dengan sampah plastik sekitar 14% plastik, dan 9% sampah kertas (Jain, 2017). Pergerakan sampah plastik darat ke laut ini juga didorong oleh aliran sungai. Dengan tercemarnya sungai, tepi sungai, dan pantai pesisir maka dapat menyebabkan masalah sampah laut plastik global (Lestari & Trihadiningrum, 2019).

Sampah plastik yang semakin meningkat juga dipicu dari kehadiran pandemi di awal tahun 2020 hingga akhir 2021. Meskipun pembatasan sosial diberlakukan guna mencegah penyebaran virus, namun disisi lain, hal ini menimbulkan konsep belanja daring yang meningkat pesat. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa sampah plastik telah meningkat secara berat sebesar 57% dan secara volume hingga 46 persen di Teluk Jakarta. Sampah plastik darat yang berasal dari perkotaan mengalir melalui sungai-sungai

di sepanjang pertengahan tahun 2020 dan bermuara di lautan. Selain itu, di tahun 2020-2021, dimana terdapat pembatasan sosial akibat dari pandemi dalam dua tahun belakangan juga telah menyebabkan maraknya transaksi belanja daring. Sebagian besar dari belanja daring tersebut menggunakan kemasan sekali pakai berbasis plastik dengan bentuk paket yang meningkat sekitar lebih dari 60 persen dan makanan cepat saji sekitar 47%. Perubahan perilaku konsumsi ini meningkat menjadi 1-10 kali per bulan di masa pandemi dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 1-5 kali. Akibat dari peningkatan transaksi belanja daring ini, maka akan membawa dampak langsung pada peningkatan jumlah sampah plastik di rumah tangga, yaitu berupa *bubble wrap*, kemasan, pembungkus, dan kantong plastik sebagai kemasan produk (LIPI, 2020).

Melihat situasi yang muncul saat ini, polusi plastik di Indonesia merupakan masalah yang tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah sekitar 30%, penanganan sampah sebesar 70%, dan pengurangan sampah plastik di laut sekitar 70%. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara *Leaders Retreat, G20 Summit* di Hamburg-Germany pada tahun 2017 (KKP, 2019). Komitmen pengurangan dan penanganan sampah ini juga bagian dari Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Jakstranas sendiri adalah kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis lainnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kebijakan ini bertujuan untuk mensosialisasikan 3R dan penanganan sampah rumah tangga yang baik serta indikator yang telah ditetapkan harus tercapai di tahun 2025.

Adapun komitmen pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% juga merupakan bagian dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Mengenai hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Sampah Plastik Laut yang terdiri dari lima pilar utama, yaitu Meningkatkan Perubahan Perilaku; Mengurangi Kebocoran Berbasis Lahan; Mengurangi Kebocoran Berbasis Laut; Mengurangi Produksi dan Penggunaan Plastik; serta Peningkatan Mekanisme Pendanaan, Reformasi Kebijakan dan Penegakan Hukum.

Permasalahan plastik di Indonesia juga tak luput dari sorotan masyarakat dunia, tak terkecuali Amerika Serikat. Untuk membantu Indonesia menangani sampah plastik di lautan, Amerika Serikat, melalui *United States Agency of International Development (USAID)*, meluncurkan program kerjasama *Municipal Waste Recycling Program (MWRP)* dengan Indonesia. MWRP merupakan program lima tahun yang dimulai dari tahun 2016-2021 dan didanai oleh USAID berupa bantuan teknis dan hibah untuk mengurangi sumber pencemaran plastik laut berbasis darat di empat negara Asia yang termasuk pencemar terbesar, yaitu Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam. Hibah MWRP ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan lokal supaya dapat memperluas kegiatan daur ulang dan mengelola limbah padat secara efektif.

Program hibah MWRP tidak hanya berorientasi terhadap kepentingan lingkungan semata, melainkan mendukung mekanisme yang mempromosikan inklusi sosial, mendukung pengelola sampah mandiri, memberdayakan perempuan dan pemuda, serta dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pendanaan USAID ini, juga diharapkan dapat mengembangkan penelitian terapan untuk dapat mengidentifikasi teknologi yang sesuai secara lokal sehingga berpotensi meningkatkan proses pengambilan keputusan dalam mengelola sampah perkotaan. Program ini merupakan bentuk nyata dari Amerika yang melibatkan pemangku kepentingan dalam pengurangan polusi plastik laut, seperti pemerintah lokal dan nasional, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, perusahaan multinasional, serta pemangku kepentingan swasta lokal, termasuk bank sampah masyarakat, toko barang bekas, restoran, toko, hotel, restoran, dan lain sebagainya.

USAID sendiri merupakan salah satu badan pembangunan internasional terbesar di dunia yang juga berfokus pada bidang lingkungan. Dalam hal ini USAID memfokuskan perhatiannya terhadap Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut terbesar di Asia Tenggara. Di perayaan 70 tahun hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 2019, Duta Besar AS Joseph R. Donovan Jr., Direktur Pengelolaan Sampah, Dr. Novrizal Tahar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, serta Staff Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dr. Tukul Rameyo Adi secara simbolis menyaksikan penandatanganan hibah dengan jumlah total Rp 18 miliar, disertai dengan bantuan

teknis yang diberikan kepada enam Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia untuk meningkatkan daur ulang dan pengelolaan sampah di daerah perkotaan (US Embassy, 2019).

Adapun studi mengenai sampah plastik laut telah dimuat ke dalam beberapa penelitian terdahulu. Dalam hal ini, peneliti melakukan tinjauan literatur yang berkorelasi dengan permasalahan sampah plastik laut dan menggunakan sepuluh jurnal yang dibagi ke dalam tiga ide penelitian, yaitu: 1) Penyebab sampah lautan, 2) Pentingnya kerjasama dalam menangani sampah laut, dan 3) Kerjasama negara dalam menangani sampah laut.

Menurut Li dan kawan-kawan (Li, et.al., 2016), terdapat dua sumber utama penyebab sampah laut, yaitu sumber berbasis darat dan laut. Sumber berbasis darat sendiri berkontribusi sekitar 80% dari sampah laut yang kebanyakan terdiri dari sampah plastik. Mereka juga menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara jumlah demografis dan berkembangnya industri terhadap budaya konsumtif sehingga menghasilkan banyak sampah plastik. Sementara limbah cair umumnya datang dari industri yang biasanya terbawa arus sungai. Sumber berbasis laut sendiri dihasilkan oleh penangkapan ikan komersial. Sampah yang sering ditemukan yaitu berupa barang penangkap ikan termasuk, jaring nilon, tali monofilament, atau perangkap ikan lainnya yang berbasis plastik. Selanjutnya Schmidt dan kawan-kawan (Schmidt, et.al., 2017) mendukung temuan sebelumnya dengan menggarisbawahi peran sungai sebagai alat transportasi utama sampah darat menuju laut. Hal ini juga berkaitan dengan *mismanage plastic waste* atau sistem plastik yang tidak terkelola dengan baik di wilayah perkotaan. Diketahui pula bahwa sebagian besar dari populasi global hidup di wilayah pesisir dan berkontribusi pada sampah plastik yang dihasilkan.

Berikutnya, Jambeck dan kawan-kawan (Jambeck, et.al., 2015) menambahkan penjelasan mengenai *mismanage plastic* dan mendapati bahwa sebagian dari total sampah plastik yang tidak dikelola akan berakhir menjadi sampah laut. Selain itu, dapat diperkirakan bahwa 61% sampah yang berakhir daerah aliran sungai merupakan sampah yang tidak tertangkap oleh penyapuan jalan atau daerah tangkapan air dan akhirnya mengalir ke Samudera Pasifik. Adapun penelitian yang ditulis oleh peneliti ini lebih menekankan pada pengelolaan

sampah perkotaan di Indonesia, dan tidak terlalu berfokus pada proses pengangkutan sampah di daerah aliran sungai.

Ide penelitian selanjutnya yaitu adalah tentang pentingnya kerjasama global dalam menangani sampah plastik di laut. Peneliti menggunakan referensi dari beberapa artikel jurnal seperti Kandziora dan kawan-kawan (Kandziora, et.al., 2019) serta Xu dan kawan-kawan (Xu, Hou, et, al., 2021). Kandziora dan kawan-kawan menemukan bahwa untuk mencapai kelestarian ekosistem laut, maka diperlukan tindakan kolektif dan terkoordinasi di tingkat nasional, regional, maupun global dengan menciptakan kemitraan lebih lanjut dan mendorong integrasi pemangku kepentingan yang lebih besar. Jaringan nasional atau regional ini dapat menjembatani kerangka *top-down* dengan menghubungkan kebijakan dan mengembangkan rekomendasi dari organisasi tingkat yang lebih tinggi, ke struktur *bottom-up*. Selain itu, kemitraan nasional dan regional memiliki keuntungan karena mereka dapat menyediakan mekanisme di mana negara dan organisasi yang kompeten dapat bekerja sama menuju implementasi langkah-langkah yang selaras untuk mengatasi tantangan keberlanjutan, khususnya jika hal ini tunduk pada rezim hukum yang berbeda atau memerlukan tindakan lintas sektoral. Dengan terbentuknya kerjasama, juga diharapkan dapat mengatasi kekurangan finansial untuk menunjang program yang direncanakan oleh pihak terkait.

Kemudian, Xu dan kawan-kawan (2021) menunjukkan bahwa kunci dari mekanisme kerjasama pengolahan sampah plastik laut adalah dengan membangun mekanisme pasar dimana antusiasme dan inisiatif kerjasama dari masing-masing subjek dapat dimobilisasi semaksimal mungkin. Dalam hal ini, negara-negara besar memiliki pengaruh dan kepemimpinan yang lebih besar dalam jaringan kerja sama tata kelola sampah plastik laut dan memiliki pengaruh penting dalam pemilihan strategi kerja sama tata kelola bagi negara-negara lain dalam jaringan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi mekanisme kerjasama tata kelola sampah plastik laut untuk mendorong negara-negara besar memainkan peran utama yang aktif dan menahan dampak dari efek destruktifnya.

Melihat pentingnya kerjasama global dalam menangani sampah plastik di laut, maka peneliti menggunakan beberapa artikel mengenai kerjasama yang telah dilakukan oleh negara ataupun lembaga donor global di negara maju dan

berkembang dalam menangani permasalahan terkait, diantaranya yaitu Bagai dan Henam (2021), Fathurachmi dan Purnawarman (2022), Borongan dan NaRanong (2022), O'brien, Ambrose, Alleyne, Lovell, dan Graham (2022), Mathis, Gillet, Disselkoen, dan Jambeck (2022).

Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh negara dalam mencegah sampah plastik ke laut yaitu terlihat dalam kerjasama yang dilakukan oleh India dan lembaga pembangunan dunia UNEP. Bagai dan Henam (2021) menjelaskan bahwa Pemerintah India bekerja sama dengan UNEP untuk mengatasi permasalahan polusi plastik di India, termasuk saat pandemi melanda. UNEP memberikan bantuan kepada India berupa *technical assistance* dan mendukung inisiatif pemerintah nasional dan sub-nasionalnya.

Di Indonesia sendiri, pencegahan sampah plastik laut salah satunya dilakukan dengan kerjasama bilateral Indonesia dan Denmark dalam mengelola limbah padat di DKI Jakarta. Fathurachmi dan Purnawarman (2022) menjelaskan bahwa dalam upaya mengelola sampah berbasis darat, Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengelola sampah perkotaan yang menumpuk di tempat pembuangan akhir menjadi energi terbarukan. Dalam hal ini, pemerintah Denmark melalui *Danish International Development Agency* (DANIDA) memberikan bantuan dana untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang akan dikelola melalui sistem *landfill gas*.

Sementara itu di Filipina, Borongan dan NaRanong (2022), memaparkan salah satu faktor yang mendukung unit pemerintah lokal dalam menangani masalah sampah plastik sendiri yaitu dengan bantuan mitra UN Habitat, WWF, dan USAID. Bantuan mitra ini diperoleh untuk mendukung ketersediaan infrastruktur sampah. Sebelum itu pemerintah harus memperoleh data dasar yang kuat, serta pertukaran informasi yang sesuai untuk kebijakan.

Adapun kontribusi lain yang dilakukan oleh negara maju terhadap sampah laut yaitu dijelaskan dalam penelitian O'brien dan kawan-kawan (O'brien, et.al., 2022). Untuk mendukung penanganan sampah plastik di lautan, pemerintah Norwegia menyediakan sumber pendanaan melalui proyek-proyek penanganan sampah laut di Karibia Timur, salah satunya melalui Proyek RemLit OECS untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah sampah laut, meningkatkan kebijakan

publik, kerangka kerja legislatif dan fiskal, dan pengembangan strategi untuk meningkatkan pergerakan transnasional sampah plastik. Pemerintah Norwegia juga mendukung proyek Kepulauan Bebas Sampah Plastik melalui Badan Pembangunan Internasional Norwegia (Norad) dan dilaksanakan oleh IUCN, mencakup sejumlah SIDS Karibia serta negara pulau kecil di wilayah Pasifik.

Terakhir, dalam penelitian Mathis dan kawan-kawan (Mathis, et.al., 2022) membahas tentang *Municipal Waste Recycling Program* sebagai bentuk dukungan dan keselarasan dengan komitmen negara-negara ASEAN untuk mengurangi polusi plastik laut. Tulisan ini membahas program MWRP secara global yang terjadi di Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam. Adapun yang membedakannya dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada studi kasus program secara signifikan di Indonesia, bukan di keseluruhan negara tujuan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diulas oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari sampah laut berasal dari sampah berbasis darat dengan sungai sebagai transportasi utama. Dalam hal ini pengelolaan sampah di darat menjadi hal yang sangat krusial dalam menghentikan produksi sampah laut terutama sampah padat atau sampah perkotaan mengingat sebagian besar kota-kota besar di dunia terletak di pesisir laut. Demikian, kerjasama internasional untuk menangani kelestarian lingkungan terutama dalam hal sampah laut menjadi penting untuk dilakukan. Melalui tindakan kolektif dan terkoordinasi di tingkat global maka akan menciptakan kemitraan lebih lanjut dan mendorong integrasi pemangku kepentingan yang lebih besar. Untuk membangun tata kelola sampah yang baik juga memerlukan sumber pendanaan yang tentunya tidak sedikit, dan dalam hal ini maka kerjasama antar negara, lembaga bantuan luar negeri, maupun organisasi internasional menjadi suatu hal yang penting. Adapun dalam penelitian ini, peneliti lebih lanjut akan membahas mengenai pencegahan pencemaran sampah plastik berbasis darat di laut Indonesia yang disebabkan oleh sampah perkotaan melalui program pendanaan USAID, *Municipal Waste Recycling Program (MWRP)* tahun 2016-2021.

I.2 Rumusan Masalah

Permasalahan lingkungan telah menjadi isu kontemporer yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional dan sangat diupayakan kelestariannya. Tak terkecuali

permasalahan sampah laut yang intensitasnya kian meningkat setiap tahun dan sebagian besar didominasi oleh sampah plastik. Meningkatnya jumlah sampah plastik di lautan sendiri berasal dari kurang memadainya pengelolaan sampah berbasis darat dan sampah perkotaan yang pada akhirnya berakhir di lautan. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut

“Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat melalui *Municipal Waste Recycling Program* sebagai upaya mencegah pencemaran sampah plastik di laut Indonesia tahun 2016-2021?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kerjasama program yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk bagaimana program ini berjalan di tengah hambatan pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir program di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai bagaimana sebuah program kerja antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat untuk mengurangi sampah plastik di lautan.
2. Dapat berfungsi sebagai informasi bagi pihak terkait yang menangani permasalahan ini, serta dapat berkontribusi dalam berbagi informasi pada masyarakat yang juga membutuhkan penelitian mengenai kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam mencegah permasalahan sampah plastik laut melalui penanganan sampah perkotaan.

b) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi untuk menambah wawasan peneliti maupun pembaca mengenai hubungan kerjasama lingkungan antar negara yang ditinjau dari teori environmentalisme serta pengimplementasiannya dalam mengembangkan suatu program berbasis lingkungan laut yang menghasilkan dampak pada perubahan tata kelola lingkungan di berbagai wilayah penerima bantuan.

I.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang penelitian sebagai dasar permasalahan serta penelitian terdahulu dengan topik yang selaras sebagai referensi peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, tujuan yang berisi maksud pengkajian masalah, manfaat tentang kontribusi penelitian pada dunia praktis, serta sistematika penulisan yang berisi gambaran umum dari isi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, terdapat landasan teori serta konsep yang menjadi landasan peneliti untuk menganalisis penelitian, hingga membantu terbentuknya alur pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian atau metode kualitatif yang mengacu pada bahan tinjauan pustaka akademik, artikel dalam jurnal ilmiah yang dipublikasikan baik dari Indonesia maupun internasional dan pendukung data ilmiah lainnya.

BAB IV KONDISI SAMPAH LAUT DI INDONESIA DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASINYA

Pada Bab IV ini peneliti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kondisi laut Indonesia yang tercemar oleh sampah padat perkotaan, termasuk kondisi sampah selama pandemi, faktor penyebab sampah plastik di laut, timbulan sampah serta

persebarannya. Kemudian, akan dibahas lebih spesifik mengenai pengelolaan limbah padat perkotaan, yang diikuti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap sampah perkotaan, jalur sampah ke laut dan potensi kebocoran. Terakhir akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencegah pencemaran sampah plastik di laut Indonesia.

BAB V KERJASAMA INDONESIA – AMERIKA SERIKAT MELALUI MUNICIPAL WASTE RECYCLING PROGRAM

Pada Bab V, peneliti membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah pencemaran sampah plastik di laut Indonesia, termasuk mengenai indikator Jakstranas dan strategi serta tujuan RAN-PSPL. Setelah itu, peneliti membahas mengenai implementasi kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat dalam membantu membangun tata kelola sampah perkotaan yang efektif dan efisien. Kemudian, lebih lanjut membahas mengenai hambatan yang dihadapi oleh USAID selaku pelaksana program dalam mengimplementasikan program tersebut di Indonesia. Terakhir yaitu analisis keberhasilan program di Indonesia.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dan keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang nantinya dapat menjadi masukan terkait kerjasama pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah perkotaan di wilayah pesisir maupun sampah plastik itu sendiri.